

Gus Yahya Tolak Mundur

Dari Halaman 1

Gus Yahya menegaskan akan menyelesaikan jabatannya sebagai Ketum PBNU sesuai mandat muktamar.

"Saya mendapatkan mandat lima tahun dan akan saya jalani lima tahun. Insyallah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur," tegasnya.

Sebelumnya beredar risalah rapat harian Syuriah PBNU memutuskan KH Yahya Cholil Staquf harus mundur dari Ketum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya risalah itu. Jika dalam tenggat itu tidak mengundurkan diri, Syuriah akan memberhentikannya.

Risalah itu ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, diputuskan dalam rapat yang dihadiri 37 Pengurus Harian Syuriah di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025.

"Musyawarah antara Rais Aam dan dua

Wakil Rais Aam memutuskan: KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU," tulis poin keputusan dalam risalah tersebut.

"Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," lanjutnya.

Berdasarkan risalah, desakan pengunduran diri itu terkait undangan narasumber jaringan zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang dianggap melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdiyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Selain itu, berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran dalam tata kelola keuangan di lingkungan PBNU.

Menyusul beredarnya risalah itu, PBNU mengumpulkan semua pengurus wilayah di Surabaya pada Sabtu (22/11/2025) malam. Rapat koordinasi penting itu digelar di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Jawa Timur atas undangan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Faisal Saimima.

Hari ini, Minggu (23/11), Ketum PBNU Gus Yahya mengundang puluhan kiai dan ulim ulama untuk menghadiri "Silaturahmi Alim Ulama" di Gedung PBNU lantai 8 di Jl Kramat Raya Nomor 164 Jakarta. Acara dijadwalkan mulai 19.30 WIB.

Dalam undangan bernomor 4773/PB.23/B.I.01.08/99/11/2025 itu ada 76 nama yang masuk daftar undangan. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh sepuh NU, ulama kharismatik, hingga intelektual NU. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tak masuk daftar.(det/ja)

Cak Imin Buka Suara

Dari Halaman 1

dengan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi NU.

"Moga-moga akan ada keputusan yang terbaik untuk NU," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketum PBNU Gus Yahya menegaskan dirinya tidak bermata mundur dari jabatannya di tengah

munculnya dinamika di internal organisasi.

"Masa amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dilanjutkan secara penuh," kata Gus Yahya di Surabaya, Jawa Timur.

Gus Yahya juga mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal

yang beredar. Termasuk dokumen mengenai risalah hasil rapat harian Syuriah pada Kamis 20 November yang memintanya untuk mundur dari jabatannya.

Dia meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mengecek keabsahannya, seperti melalui bukti tanda tangan digital yang kerap digunakan untuk penandatanganan surat dalam organisasi tersebut.(tl/ja)

Sikap Pengurus Wilayah

Dari Halaman 1

menata keputusan yang dikeluarkan oleh Rais Aam ihwal pemakzulan Yahya.

"Rais Aam PBNU adalah jabatan tertinggi di organisasi. Kami mendengar dan menata titahnya," kata dia saat dihubungi pada Sabtu, 22 November 2025.

TERIMA

Sikap berbeda datang dari PWNU Jawa Tengah. Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin mengatakan kelompoknya bakal menerima apa pun konsensus yang dihasilkan oleh para pemegang otoritas.

Sebab, menurut dia, pada dasarnya pengurus wilayah dan cabang tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam memberikan dukungan maupun tidak dalam dinamika internal organisasi. Rozin berharap penyelesaian dinamika ini bisa dilakukan dengan kepada dingin.

"Kami memohon kepada PBNU untuk mencari formulasi terbaik atas perbedaan pendapat yang berpotensi mengganggu solidaritas dan konsolidasi NU secara nasional," ujarnya dihubungi Sabtu, 22 November 2025.

Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif juga berpendapat serupa.

Samsul mengatakan dinamika yang berkembang di rapat harian syuriah itu menjadi kewenangan PBNU dan jajaran syuriah.

"Kami pada hakikatnya menghargai semua pendapat yang berkembang," kata dia ketika dihubungi pada Sabtu, 22 November 2025.

Dia berharap semua pengurus NU di seluruh tingkatkan agar tidak berkomentar maupun berspekulasi apa pun mengenai dinamika ini.

Sebab, pengurus wilayah dan tingkatkan di bawahnya tidak memiliki wewenang untuk ikut campur persoalan antara PBNU dan jajaran syuriah.

"Mudah-mudahan ada titik temu terbaik untuk kemaslahatan organisasi NU. Pokoknya kami hanya menunggu," ucapnya.

MAKZUL

Permintaan memakzulkan Yahya Cholil Staquf dari posisi Ketua Umum PBNU muncul dalam risalah rapat harian Syuriah. Rapat itu digelar di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.

Mereka meminta Yahya Cholil mundur dalam waktu tiga hari ke depan sejak risalah rapat itu

dibuat. Bila Yahya tidak mengundurkan diri hingga batas waktu yang telah ditentukan, Syuriah PBNU menyebut akan memakzulkan kakak dari mantan Menteri Agama Ya'qut Cholil.

Upaya pemakzulan Yahya disebut berkaitan dengan hadirnya akademik Zionis, Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU beberapa waktu lalu. Peter Berkowitz pernah menulis buku Israel and The Struggle Over The International Laws of War, yang berisi pembelaan atas Israel terhadap pelbagai kritik hukum internasional.

Forum rapat harian Syuriah PBNU menilai, kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan zionisme internasional telah melanggar nilai serta ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mereka juga menilai kehadiran peneliti yang pro-zionis itu bertentangan dengan muqaddimah quan asasi NU.

Syuriah PBNU berpandangan, pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional NU dengan narasumber zionis melanggar peraturan organisasi. Tindakan ini dianggap telah mencemarkan nama baik PBNU, sehingga dalam Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, pemberhentian fungsionaris perlu ditempuh. (tempat/cp)

Penjelasan Syuriah

Dari Halaman 1

PB.02/A.I.01.47/99/11/2025 itu ditujukan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) se-Indonesia.

Surat penjelasan tersebut diteken Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Katib Syuriah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir, tertanggal 22 November 2025. Berikut beberapa poinnya.

Rapat Harian Syuriah Sah dan Kuorum

Surat klarifikasi tersebut menegaskan bahwa Rapat Harian Syuriah PBNU memang benar dilaksanakan pada Kamis, 20 November 2025, pukul 17.00-20.00 WIB di Hotel Aston City Jakarta.

PBNU mengklaim rapat tersebut sah dan telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh 37 orang dari total 53 Pengurus Harian Syuriah (sekitar 69 persen). Tercatat 7 orang izin tidak hadir, sementara 9 orang tidak hadir tanpa pem-

beritahuhan.

Dokumen Risalah Rapat tersebut juga disebut sah secara aturan organisasi. Menurut PBNU, dokumen hasil rapat Syuriah ditandatangani secara manual oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku Pimpinan Rapat, sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Perkumpulan NU Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat.

Surat Pengantar ke Gus Yahya Belum Tuntas

Surat tabayun ini juga mengonfirmasi adanya tindak lanjut administrasi terkait keputusan rapat yang meminta Gus Yahya mundur. Merujuk pada keputusan rapat (butir 5), Staf Pengurus Besar Syuriah menyiapkan surat pengantar resmi kepada KH Yahya Cholil Staquf yang seharusnya ditandatangani Rais Aam dan Katib Aam.

Namun, surat ini mengungkapkan bahwa hingga surat klarifikasi diterbitkan, surat pengantar tersebut masih belum ditandatangani oleh Katib Aam selaku penanda tangan pertama dalam platform digital organisasi (Digidaya

Persuratan).

Gus Yahya Tolak Terima Dokumen Langsung

Poin paling dramatis dalam klarifikasi ini adalah detail penyerahan Risalah Rapat tersebut kepada Gus Yahya.

PBNU menjelaskan, pada Jumat sore (21/11/2025), saat Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sowan (berkunjung) kepada Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muahajir di kawasan Ancol Jakarta, dokumen Risalah Rapat telah diserahkan secara langsung.

"Namun demikian, setelah membaca dokumen Risalah Rapat dimaksud, KH. Yahya Cholil Staquf menyerahkan kembali kepada KH. Afifuddin Muahajir," tulis surat tersebut, yang mengindikasikan penolakan Gus Yahya untuk menerima keputusan resmi itu.

Surat tabayun ini disampaikan kepada seluruh tingkat pengurus NU sebagai pedoman resmi PBNU dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.. (det/ja)

KPK: Miris

Dari Halaman 1

melakukan penyidikan terkait dengan penyelenggaraan haji juga," ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/11) malam.

Diambahkan, secara institusi, baik BPKH maupun Kementerian Agama memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Selain itu, KPK bersama Kementerian Haji juga sudah melakukan audiensi untuk membahas titik-titik rawan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.

"Dan tentunya ini menjadi PR kita bersama. Tidak hanya KPK, tapi juga institusi terkait untuk kemudian kita bisa melakukan pemberhan dengan lebih serius terkait dengan tata kelola haji ini," ucap Budi.

Namun, surat ini mengungkapkan bahwa hingga surat klarifikasi diterbitkan, surat pengantar tersebut masih belum ditandatangani oleh Katib Aam selaku penanda tangan pertama dalam platform digital organisasi (Digidaya

dan piyah UIN Sumut).

Johan juga menyatakan, pihaknya akan mengerahkan massa ke Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi untuk mendekati aparat penegak hukum tersebut turun tangga.

"Sebab, pengerjaan proyek pembangunan Gedung Kampus V UIN Sumut itu menggunakan uang negara," ungkap Johan. (A-10)

Pembangunan Kampus V UIN Sumut Disoal

Dari Halaman 1

kampus yang kini dalam penggerakan, dibangun di atas lahan tanah yang dikeluarkan Kementerian Agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Lubuk PAKAM, Kelas 1-A Nomor 14/Pdt.Eks/2024/PN-Lbp. Jo 3/Pdt/P-Kons/2024/PN-Lbp, tetapi ternyata diduga telah

melewati batas yang semestinya. Salah seorang aktivis Sumatra Utara, Johan Merdeka kepada wartawan menuturkan, ukuran tanah yang akan dibangun Kampus V UINSU tidak sesuai. Selain itu, tak tertera plank proyek dan diduga pembangunan gedung kampus tersebut belum dilengkapi PBG.

Untuk itu, ia pun meminta kepada pihak inspektorat untuk memeriksa pimpinan proyek

ekonomi daerah. Namun ketika komposisinya timpang, ketika porsi kredit produktif kecil tersingkir oleh kredit konsumtif dan kredit proyek maka visi bank daerah melemah. Pertumbuhan ekonomi rakyat kecil terhambat. Pasar lesu. Pelaku usaha mikro kehilangan peluang.

Bank daerah bukan sekadar pencetak laba.

Dan mandat itu sedang menunggu dipenuhi.



Azhari AM Sinik Dianugerahi Gelar Datuk Seri Panglima Warta Diraja

Langkat, MIMBAR -

Tokoh masyarakat Sumatera Utara Azhari AM Sinik dianugerahi gelar Datuk Seri Panglima Warta Diraja yang dinobatkan langsung oleh Sultan Negeri Langkat, Tuanku Sultan Harimugaya Abdul Djafil Rahmatsyah.

Dia pun berharap, kepada tokoh-tokoh tersebut nantinya dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat kepada masyarakat.

Sementara, Azhari AM Sinik yang dianugerahi Gelar Datuk Seri Panglima Warta Diraja, mengaku senang dan bersyukur atas pemberian gelar tersebut.

"Saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa ini. Semoga kedepannya, saya bisa berbuat semakin banyak lagi untuk melestarikan tradisi budaya Melayu," imbuhnya.

Selain Azhari AM Sinik, Sultan Langkat juga memberikan penghargaan serupa kepada tokoh-tokoh lainnya.(A-10)

Hidayah

Prabowo dan Poros Baru Melayu-Islam

Dari Halaman 1

ayu-Islam sebagai identitas geopolitik, kekuatan diplomatis, dan instrumen soft power Indonesia dalam tatanan global yang berubah cepat.

Konsep poros Melayu Islam berangkat dari kesadaran bahwa dunia Melayu memiliki modal sejarah, budaya, demografi, dan geografi yang dapat menjadi kekuatan baru di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan wilayah dengan populasi lebih dari 350 juta jiwa yang selama berabad-abad menjadi pusat perdagangan maritim, penyebaran Islam, dan interaksi peradaban. Di masa lalu, Samudera Pasai, Malaka, Johor-Riau, dan Aceh Darussalam pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan global dan pusat pembelajaran Islam. Prabowo ingin menghidupkan kembali potensi tersebut dalam bentuk kerja sama yang lebih terstruktur, modern, dan relevan dengan realitas geopolitik abad ke-21.

Dalam visi Prabowo, poros Melayu-Islam bukanlah blok politik atau organisasi formal, melainkan platform strategis yang mengintegrasikan diplomasi, ekonomi maritim, pertahanan, dan budaya. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan kawasan untuk memperkuat ketahanan menghadapi tekanan besar di Indo-Pasifik. Indonesia, sebagai jangkar utama kawasan, berusaha memosisikan diri sebagai penyeimbang (balancer) sekaligus mediator antara kepentingan global dan kebutuhan stabilitas kawasan.

Pada sektor pertahanan, Prabowo menekankan pentingnya modernisasi militer sebagai syarat utama diplomasi yang efektif. Indonesia perlu mengamankan jalur perairan strategis seperti Selat Malaka, Laut Natuna, dan jalur pelayaran